

BAB 2

RELASI TAIWAN-KEPULAUAN SOLOMON DAN RELASI TIONGKOK-KEPULAUAN SOLOMON

Bab ini akan membahas dua relasi utama : relasi antara Taiwan dengan Kepulauan Solomon dan relasi antara Tiongkok dengan Kepulauan Solomon. Selain itu, pada bab ini penulis juga menyertakan kritik terhadap kebijakan yang telah / akan ditawarkan kepada Kepulauan Solomon untuk mengetahui seberapa berpengaruh kritik yang ada terhadap keputusan Kepulauan Solomon.

2.1. Relasi Taiwan-Kepulauan Solomon

Sub bab ini akan memaparkan kebijakan-kebijakan Taiwan yang telah dilakukan untuk Kepulauan Solomon selama era Presiden Tsai Ing-wen (keduanya masih menjalin hubungan diplomatik resmi), dan termasuk *dalam soft power* menurut Joseph Nye, Jr : kebijakan TaiwanICDF dan nilai HAM-demokrasi melalui laman resmi TaiwanICDF dan berbagai data pendukung seperti pidato Tsai Ing-wen.

2.1.1. TaiwanICDF : Agrikultur, Kesehatan, dan Infrastruktur Skala Kecil-Menengah

Dalam relasinya dengan Kepulauan Solomon, Taiwan lebih berfokus kepada pemberian bantuan teknis dalam bidang agrikultur, kesehatan, dan infrastruktur berukuran kecil-menengah. Melalui TaiwanICDF (*The International Cooperation and Development Fund*), Taiwan bertujuan untuk meningkatkan perkembangan sosio-ekonomi, kemampuan sumber daya manusia, dan mempromosikan hubungan ekonomi dengan negara partner. Melalui laman resmi ICDF pemerintah Taiwan, bantuan teknis yang diberikan berfokus kepada 4 bentuk : pinjaman dan investasi, kerjasama teknis, bantuan kemanusiaan, serta pendidikan dan pelatihan internasional.

2.1.1.1. Pinjaman dan investasi untuk daerah terpencil

Rural Credit Project merupakan proyek yang memberikan pinjaman berjangka sebesar \$2 juta dolar kepada pemerintah Kepulauan Solomon (SIG), sejak 1998. SIG / pemerintah berperan dalam menyalurkan hasil pinjaman ke Bank Pembangunan Kepulauan Solomon (DBSI), yang bertindak sebagai perantara keuangan tingkat pertama dan meminjamkan kembali dana tersebut kepada orang-orang di masyarakat pedesaan, atau sebagai perantara tingkat kedua ketika kelompok sasaran tidak dalam jangkauan langsung.

Dari pinjaman US \$ 2 juta, dua jalur kredit tersebut diwujudkan dalam:

- (1) Kredit Pedesaan: US \$ 1,7 juta (85 persen) digunakan untuk membiayai kegiatan usaha di antara individu, komunitas atau perusahaan di daerah pedesaan di seluruh Kepulauan Solomon, dengan mengecualikan Honiara. Proyek ini tidak terbatas pada sektor pertanian, industri, komersial, transportasi dan jasa.
- (2) Kredit Produksi Beras Taiwan: US \$ 300.000 (15 persen) disalurkan kepada peserta Proyek Produksi Beras Taiwan.

Proyek ini disebutkan berkeinginan untuk mengakselerasi perkembangan wilayah-wilayah terpencil di Kepulauan Solomon. Potensi perkembangan wilayah terhalangi oleh terbatasnya dana dan sumber daya manusia untuk kegiatan komersil dan produksi, sehingga proyek ini memiliki 2 tujuan utama :

- (1) Menyediakan jalur kredit jangka menengah dan panjang ke daerah pedesaan untuk mengatasi kendala sumber daya yang dihadapi masyarakat pedesaan, meningkatkan efisiensi mobilisasi sumber daya dan memperkuat mekanisme perantara dan alokasi dana pembangunan.
- (2) Memberikan kredit kepada peserta Proyek Produksi Beras Taiwan untuk mempertahankan tingkat produksi dan meningkatkan pendapatan petani pedesaan.

2.1.1.2. Kerjasama Teknis

Dalam bidang kerjasama teknis, pemerintah Taiwan melalui *Taiwan Technical Mission* (TTM) banyak bekerjasama dengan Menteri Pertanian dan Peternakan Solomon (MAL) dalam bidang agrikultural dan peternakan seperti *Integrated Hog-Raising Project*, *Vegetable And Fruit Improvement*, dan *Food Crop Improvement Project*.



Gambar 2.1 Dokumentasi manager *Taiwan Technical Mission* (TTM) dengan peternak babi lokal dalam proyek *Integrated Hog-Raising Project* di Kepulauan Solomon.

(Sumber : Youtube TaiwanICDF)

Diimplementasikan sejak tahun 2015 dengan jangka proyek 6 tahun, *Integrated Hog-Raising Project* merupakan proyek yang berfokus kepada peternakan babi sebagai salah satu tradisi sosial-budaya Kepulauan Solomon dan sumber nutrisi penting bagi masyarakatnya. Namun, teknik beternak babi relatif kurang berkembang di daerah yang lebih terpencil di negara tersebut, akibatnya industri peternakan babi lokal tidak dapat memenuhi permintaan publik akan daging babi dan meningkatkan harga babi secara drastis. Oleh karena itu, pemerintah Taiwan bersama pemerintah Kepulauan Solomon berharap dapat meningkatkan produksi

babi lokal dan pasokan daging babi terkait melalui pelaksanaan proyek kerja sama ini.

Dari proyek ini ditemukan bahwa tantangan utama untuk mempromosikan produksi daging babi lokal adalah kualitas babi domestik yang tidak dapat memenuhi permintaan pasar, dan kurangnya operasi pembiakan anak babi di pulau-pulau terluar Kepulauan Solomon. Kepulauan Solomon juga terbatas dalam sumber daya manusia untuk karantina hewan dan keterampilan beternak babi, terkhususnya di pulau-pulau terluar yang lemah, secara tidak langsung membatasi produksi babi lokal.

Proyek ini disebutkan berfokus kepada pemberdayaan lingkungan produksi, formulasi pakan ternak, dan teknik pembiakan untuk menghindari parasit pada ternak. Hingga akhir Juli 2019, proyek ini disebutkan telah menghasilkan 8,915 anak babi, melakukan konseling kepada 2,339 keluarga peternak, memproduksi 424 ton pakan ternak, mengadakan 51 pelatihan, mengadakan 24 pelatihan manajemen, melakukan pelatihan untuk 26 petugas karantina dan dokter hewan, mengadakan 21 sesi latihan untuk kesehatan dan keamanan hewan ternak babi, dan 4 sesi pelatihan terkait pencegahan penyakit dan parasit di 3 provinsi.



Gambar 2.2 Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen dan Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare mendengarkan penyuluhan terkait proyek pengembangan buah dan sayuran melalui TaiwanICDF di Kepulauan Solomon (Sumber : laman *press release* kantor kepresidenan Taiwan, <https://english.president.gov.tw/>)

Vegetable And Fruit Improvement merupakan proyek yang bertujuan untuk meningkatkan pengembangan dan teknik dalam produksi buah dan sayuran Kepulauan Solomon. Taiwan merupakan negara dengan *self-sufficiency* dalam makanan, terkhususnya sayuran dan buah-buahan dengan tingkat lebih dari 80 persen (Lee, 2011). Walaupun terbatas secara luas geografis dan iklim, Taiwan memaksimalkan produksi agrikulturnya melalui “*smart agriculture*” (businessmirror.ph, 2019) dengan mengkombinasikan kemajuan teknologi seperti rumah kaca dan panel solar untuk produksi buah dan sayuran. Kemajuan Taiwan dalam agrikultur dan teknologi membawa Taiwan menerapkan misi agrikultur dalam kebijakan luar negerinya melalui TaiwanICDF.

Melalui proyek ini, Taiwan berfokus kepada pemberian bibit unggul untuk petani dan institusi pendidikan, mendirikan pusat pelatihan di provinsi Malaita dan Guadalcanal, serta melatih para petani. Hingga akhir Juli 2019, disebutkan proyek telah berhasil mencapai 139,864 produksi bibit buah dan sayuran, pelatihan untuk 60 petani, kerjasama dengan 15 institusi pendidikan dalam perawatan dan produksi, mengadakan 27 seminar terkait diet sehat dengan buah dan sayuran, dan 21 seminar terkait perkembangbiakan buah dan sayuran.



Gambar 2.3 Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen dan Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare berpartisipasi dalam penanaman bibit ubi manis Taiwan bersama murid-murid sekolah.
(sumber : laman *press release* kantor kepresidenan Taiwan, <https://english.president.gov.tw/>)

Food Crop Improvement Project, pengalaman Taiwan dalam mengolah lahan agrikultur terbatas ikut diterapkan dalam misinya ke Kepulauan Solomon. Proyek ini berfokus kepada perlindungan hasil panen dan produksi beras di daerah terpencil yang ketergantungan terhadap produksi lokal masih tinggi. Proyek ini bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan produksi panen yang stabil, mengingat terdapat 2 tantangan terkait hasil panen pangan di Kepulauan Solomon : hasil panen per komoditas yang masih rendah dikarenakan penanaman banyak jenis sekaligus dan hasil panen yang masih rendah secara general dibandingkan negara lain.

Proyek ini berfokus untuk : melakukan purifikasi lahan dan pengenalan bibit baru yang sesuai dengan kesukaan masyarakat, menyediakan bibit berkualitas tinggi untuk petani lokal dan mengadakan pelatihan teknis secara langsung di lapangan, dan meningkatkan teknik penanaman petani lokal melalui workshop dan berbagai demonstrasi. Disebutkan, dari Januari 2016 hingga Desember 2019 melalui proyek ini telah tercapai 8 demonstrasi terkait penanaman dengan 9 institusi desa / *rural training center* (RTC), 17 workshop secara langsung di lapangan terkait manajemen, memproduksi 1,150,021 bibit ubi manis; 376,056 bibit ketela; 102,493 bibit talas; 91,013 bibit ubi Cina, memproduksi 41,8 hektar ubi manis; 29,93 hektar ketela; 8,71 hektar ubi Cina; dan 6,1 hektar talas, serta memproduksi 15,729 bibit beras.

2.1.1.3. Bantuan kemanusiaan

Disadur dari Hodge et al (2015), pelayanan kesehatan di Kepulauan Solomon memiliki keunggulan dan juga kelemahan. Keunggulannya nampak dari performa sistem kesehatan yang positif, mencapai cakupan yang luas, tingkat kepuasan tinggi, dan progres yang stabil pada kondisi setelah perawatan. Namun angka demografik yang terus meningkat turut

memperburuk sistem pelayanan kesehatan Kepulauan Solomon, seperti kurangnya peralatan medis, kondisi klinik yang sangat membutuhkan renovasi dan perbaikan, dan kesediaan petugas kesehatan yang tidak merata. Diharapkan hubungan bilateral Taiwan-Kepulauan Solomon banyak berkontribusi dalam mengatasi tantangan pelayanan medis Kepulauan Solomon.

Melalui *Healthcare Personnel Training Project*, setiap tahunnya Taiwan mengirim personel medis dari negara partner untuk melakukan pelatihan 1-3 bulan di rumah sakit Taiwan yang dituju, yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan kualitas kesehatan negara partner. Tercatat, tahun 2016 proyek ini mengirim 26 personel dari 17 negara, tahun 2017 22 personel dari 12 negara, tahun 2018 23 personel dari 10 negara, dan tahun 2019 15 personel dari 9 negara. Universitas dan rumah sakit Taiwan seperti *Mackay Memorial Hospital*, *Kaohsiung Medical University* dan *Chi Mei Hospital* juga disebut banyak berkontribusi dalam pendampingan medis melalui penyediaan persediaan alat-alat kesehatan dan pendirian laboratorium demam berdarah pertama di Kepulauan Solomon.

Disadur dari Lin Chii-jeng (2019), Taiwan sangat unggul melebihi Tiongkok dalam kekuatan medis dan kontribusi dalam dunia kesehatan global. Melalui sistem asuransi kesehatan universal Taiwan, sistem pelayanan kesehatan untuk jangka panjang, dan teknologi medis Taiwan sesungguhnya banyak berkontribusi untuk dunia global yang sering tidak diakui oleh masyarakat internasional karena konflik politik. Dalam index pelayanan kesehatan Bloomberg tahun 2018, Taiwan berada dalam peringkat 9 besar perihal biaya kesehatan dan angka harapan hidup, jauh melesat melebihi Amerika di urutan 26 dan Tiongkok di urutan ke 20. Melihat hal ini, Lin memandang *soft power* terkuat Taiwan adalah

pelayanan medis dan kesehatan, yang termasuk dalam isu humaniter dan keilmuan yang juga diusung oleh PBB.

2.1.1.4. Pendidikan dan pelatihan internasional

Melalui *International Higher Education Scholarship Program*, Taiwan memberikan beasiswa untuk belajar di 21 universitas Taiwan untuk 31 program gelar sarjana, master, dan doktor. Disebutkan, program ini memberikan beasiswa penuh yang mencakup tiket pulang pergi, tempat tinggal, biaya pendidikan, asuransi, biaya buku, dan uang bulanan. Sejak tahun 1998, tercatat 2000 pelajar asing belajar di Taiwan dengan beasiswa TaiwanICDF. Dan di tahun 2019, terdapat 125 siswa internasional dari Kepulauan Solomon dengan 86 siswa memperoleh beasiswa pemerintah Taiwan. Bahkan dalam *tagline* video resmi beasiswa TaiwanICDF, Taiwan menggunakan slogan “*Changing the World through Seeds of Hope*” yang menunjukkan betapa pentingnya pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu melakukan perubahan global yang berkelanjutan.

Selain beasiswa, Taiwan menggunakan *soft power* untuk Kepulauan Pasifik dalam bentuk forum multilateral bertajuk *Pacific Islands Leadership Program with Taiwan (PILP)*. Dimulai sejak tahun 2013, PILP merupakan sebuah program yang menargetkan kaum pekerja profesional usia 25-38 untuk meningkatkan pengalaman belajar di kampus *East-West Center* di Honolulu, Hawai’i selama 1 bulan, yang kemudian dilanjutkan selama 6 minggu di kantor *Taiwan’s Institute of Diplomatic and International Affairs (IDIA Taiwan)*. Program ini hanya dibuka untuk penduduk Kepulauan Pasifik yang memiliki ketertarikan dengan pelatihan kepemimpinan dan berkomitmen untuk meningkatkan kedamaian dan kemakmuran wilayah Pasifik seperti : Kepulauan Cook, Kepulauan Solomon, Federasi Mikronesia, Fiji, Kiribati, Nauru, Niue, Palau, Papua

Nugini, Polinesia Perancis, Republik Marshall, Samoa, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu. Program ini bertujuan untuk memperkuat pengetahuan dan pemahaman peserta terkait ekonomi, sosial, politik, kesehatan, edukasi, dan isu lingkungan global yang turut mempengaruhi Kepulauan Pasifik-Asia-Amerika, sehingga dapat diterapkan kembali dan memberi kontribusi berarti ke wilayah melalui pekerjaan masing-masing. Disebutkan, program ini memberikan berbagai manfaat seperti uang saku, biaya tempat tinggal, asuransi kesehatan, materi pembelajaran, biaya hidup, tiket pesawat ke Honolulu, tiket pesawat Honolulu-Taipei, tiket pesawat dari Taipei ke negara masing-masing, dan biaya visa SEVIS. Di tahun 2018, total 144 pemimpin muda Pasifik berpartisipasi dalam program, termasuk peserta dari 8 negara Kepulauan Pasifik yang memiliki hubungan diplomatik dengan Tiongkok.



Gambar 2.4 Wakil Menteri Luar Negeri Taiwan, Hsu Szu-chien berada di tengah bersama pejabat resmi dan peserta PILP 2019

(sumber : <https://taiwantoday.tw/>)

2.1.2 Demokrasi dan HAM

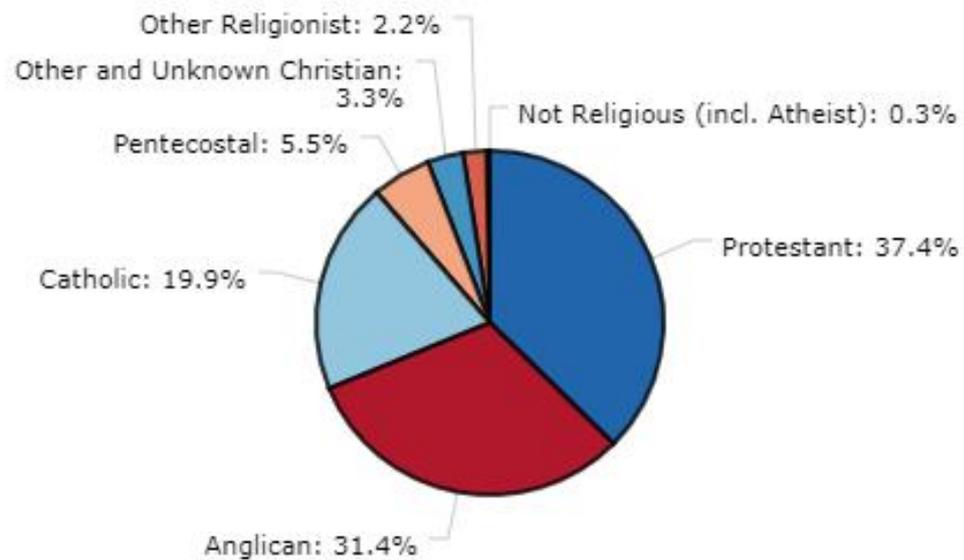
Taiwan menganut ideologi politik yang sarat dengan nilai demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia, dimana bertentangan dengan ideologi politik Tiongkok berupa komunisme. Bahkan dalam perayaan ke-70 berdirinya

Partai Komunis Tiongkok, Presiden Tsai Ing wen mengecam kediktatoran Tiongkok daratan dan ekspansi militernya “*seriously threatening regional peace and world democracy and civilization*”.

Tsai menambahkan, “*We are a country of democracy and freedom and will show support for anyone in the world who pursues democracy and freedom*” yang menunjukkan posisi dan komitmen Taiwan untuk terus membawa dan memperjuangkan nilai demokrasi dan penghargaan setingginya terhadap hak asasi manusia dalam kebijakan luar negerinya. *Soft power* Taiwan dalam demokrasi dan HAM sejalan dengan nilai perdamaian melalui agama yang diusung Kepulauan Solomon.

Disebutkan oleh Yannick Fer (2011, p.2), Kepulauan Pasifik memiliki sejarah yang sama terkait religi dimana agama Kristen masuk dan menggeser agama lokal (seperti aksi kanibalisme). Agama Kristen kian menguat di Pasifik dan selagi bercampur dengan budaya tradisional, agama Kristen berkontribusi banyak kepada tatanan politik baru, perang tradisional, dan meminimalisir konflik lokal. Bahkan negara-negara di Kepulauan Pasifik mengakui agama sebagai identitas nasional mereka (ibid, 2011, p.15), yang artinya agama sebagai identitas kolektif negara-negara di Kepulauan Pasifik. Massifnya pengaruh moralitas Kristen membuat wilayah Kepulauan Pasifik jarang diisukan dalam intoleransi agama dan kekerasan oleh badan HAM PBB. Nilai budaya terkait solidaritas dan konsensus bersatu dengan moralitas Kristen terkait moral masing-masing individu sehingga melahirkan “pasifisme” dalam kehidupan sehari-hari.

Khususnya untuk Kepulauan Solomon, persatuan gereja-gereja Kristen di Kepulauan Solomon (*Solomon Island Christian Association- SICA*) pernah mengakhiri konflik berdarah antara Malaitan (*Malaita Eagle Force- MEF*) dan Guadalcanese (*Isatabu Freedom Movement-IFM*) di tahun 2000, yang menunjukkan efektifitas agama di Kepulauan Solomon dan nilai inklusifnya, yang membuat Kepulauan Solomon semakin tidak lepas dari nilai agama.



Gambar 2.5 Kelompok agama terbesar di Kepulauan Solomon tahun 2015

(sumber : Religious Characteristic of States, 2015)

Hal tersebut menunjukkan nilai demokrasi dan HAM yang diusung oleh Taiwan sejalan dengan nilai religius Kepulauan Solomon. Demokrasi sarat akan kebebasan individu, anti represi, dan prinsip *check and balance*. Yang artinya, dalam demokrasi represi terkait agama sangatlah minim. Kebebasan beragama (*religious freedom*) turut dipandang sebagai salah satu hak dasar dan utama dari hak asasi manusia seperti yang disampaikan Tsai Ing-wen :

“Taiwan is willing to share its experiences on the path to religious freedom with the rest of the world. We must use our morals and courage to stand with those who suffer religious oppression. I am certain that accommodating diverse religious beliefs is essential for a democratic society. And I believe Taiwan can do more to help our brothers and sisters around the world, regardless of their nationality or religious beliefs..... so that we can create a truly inclusive and equal world, free from religious persecution” (transkrip pidato dalam International Religious Freedom Forum Mei 2019)

Nilai tersebut juga digunakan oleh Taiwan untuk mengikat hubungan Taiwan dengan Pasifik secara umum, yang tersirat dalam tema kunjungan formal 2017-2019 Tsai Ing-wen. Kunjungan tersebut pada 2019 berfokus kepada Palau, Nauru, dan Kepulauan Marshall yang disebut terikat oleh Samudra Pasifik dan nilai-nilai demokratis, melanjutkan kunjungan pertamanya ke Pasifik tahun 2017 kepada Kepulauan Marshall, Kepulauan Solomon, dan Tuvalu.



Gambar 2.6 Ilustrasi resmi kunjungan kepresidenan ke Kepulauan Pasifik yang disebut sebagai 'lautan demokrasi' (sumber : laman twitter Tsai Ing-wen)

2.2 Kritik terhadap Relasi Taiwan-Kepulauan Solomon

Dengan mengetahui kritikan yang ada, tulisan ini hendak menganalisa seberapa jauh kritikan tersebut mempengaruhi keputusan dan perspektif Kepulauan Solomon terhadap dua negara. Disadur dari *Little Red Podcast* berjudul “Should I Stay or Should I Go Now? Inside the Solomons’ Big Switch” yang mewawancarai PM Kepulauan Solomon, menyebutkan setidaknya terdapat 3 kritik terhadap kerjasama antara Kepulauan Solomon dengan Taiwan yang telah lama terjalin :

2.2.1. Aliran dana yang korup (*Cheque Book Diplomacy*)

Salah satu bantuan Taiwan diluar TaiwanICDF dan HAM-demokrasi merupakan berbentuk *Rural Constituency Development Funds* / Dana

Pembangunan Desa, yang mencapai \$29,3 juta di tahun 2017 untuk program tersebut (Putri, 2019, p.131). CDF berfokus kepada pembangunan wilayah, terutama daerah terpojok . Dana tersebut kemudian diatur dan dipegang oleh *Member of Parliament* (MP) Kepulauan Solomon dan diyakini banyak skema korupsi dan penggelapan dana di dalamnya. Batley (2015) juga mengungkapkan bahwa terdapat sangat sedikit informasi bagaimana dana CDF digunakan, bagaimana transparansinya, bahkan banyaknya ketidakpedulian warga lokal terkait penggunaan CDF itu sendiri.

Kritikan datang kepada Taiwan karena dianggap membiarkan skema korup tersebut-bahkan ‘mendukungnya’- untuk mempertahankan dukungan dan suara Kepulauan Solomon dalam politik internasional (Smith, 2019). Taiwan dipandang melakukan Diplomasi Buku Cek terselubung, atau menyuap para elit Kepulauan Solomon.

2.2.2. Realisasi misi yang kurang maksimal

Salah satu MP yang pro Beijing mengungkapkan fakta lapangan, tidak maksimalnya realisasi misi yang dilakukan Taiwan. Salah satunya dalam pembangunan Rumah Sakit Rujukan Nasional dan pemberian fasilitas yang bahkan disebut berbentuk ‘kamp pengungsian’. Walaupun tidak semua misi yang dilakukan Taiwan melalui TaiwanICDF tidaklah maksimal, namun kritik tersebut menunjukkan adanya realisasi yang jauh dari data yang disampaikan, serta kurangnya evaluasi dan perbaikan dari pemerintah Taiwan.

2.2.3. ‘Mudah’ diintervensi

PM Sogavare menyebutkan dengan lugas, bahwa dalam konteks ekonomi dan politik Taiwan cenderung lemah atau bahkan ‘kurang berguna’ untuk Kepulauan Solomon. Hal tersebut diakibatkan oleh mudah diintervensinya kebijakan Taiwan oleh negara lain seperti Australia dan Amerika. Salah satunya adalah ketika Menteri Pertahanan Australia mengunjungi Taiwan untuk meminta dihentikannya latihan 40 polisi Kepulauan Solomon, dan latihan tersebut segera dihentikan. Menunjukkan

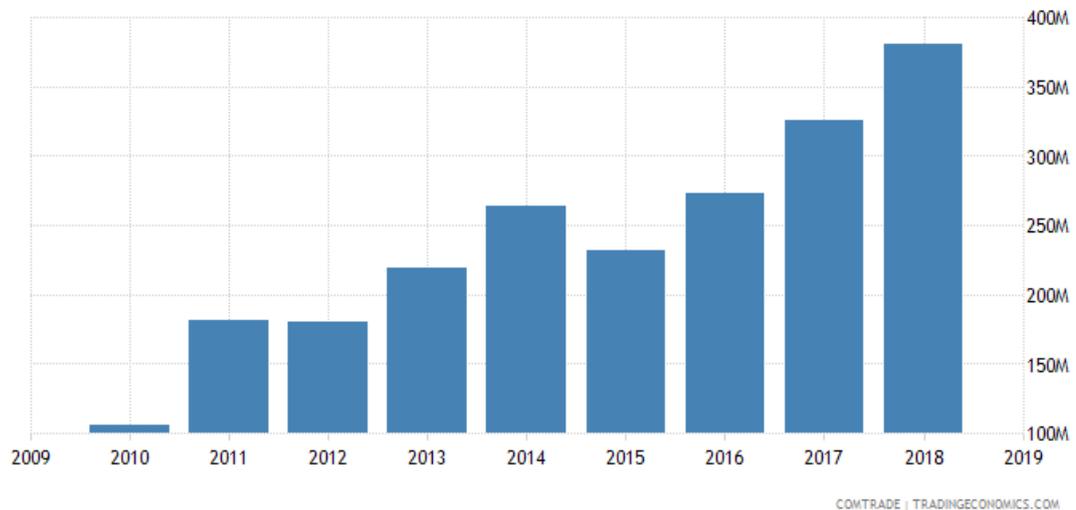
bahwa pengaruh Taiwan sebagai entitas internasional kurang kuat dan kurang berpengaruh sehingga mudah untuk diintervensi dan dipengaruhi. Hal ini juga didukung oleh Krumbein (2020), bahwa relasi Taiwan dengan negara lain dibatasi oleh status Taiwan yang masih diperdebatkan dalam politik internasional. Status tersebut membuat Taiwan tidak mudah untuk melawan atau mengkritik negara lain.

2.3. Relasi Tiongkok – Kepulauan Solomon

Sub-bab ini akan memaparkan kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh Tiongkok untuk Kepulauan Solomon, baik kebijakan yang sudah ada sejak dulu (partner dagang dan institusi pendidikan) atau baru ditawarkan (program BRI).

2.3.1 Partner Dagang

Menurut Denghua Zhang (2019), Tiongkok merupakan partner dagang terbesar Kepulauan Solomon, dengan volume perdagangan 14 kali lebih besar dibandingkan perdagangan dengan Taiwan.



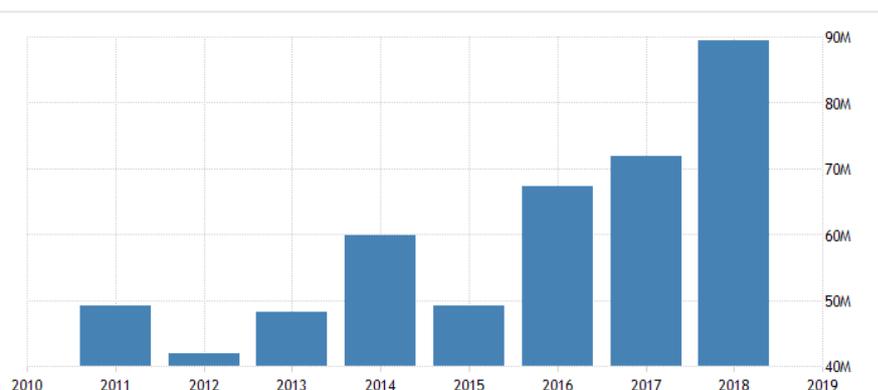
Gambar 2.7 Volume perdagangan ekspor Kepulauan Solomon – Tiongkok yang terus meningkat (sumber : tradingeconomics.com)

	Value	Year
Wood and articles of wood, wood charcoal	\$358.48M	2018
Ores slag and ash	\$21.29M	2018
Pearls, precious stones, metals, coins	\$412.75K	2018
Articles of iron or steel	\$147.73K	2018
Machinery, nuclear reactors, boilers	\$23.19K	2018
Live animals	\$627	2018
Electrical, electronic equipment	\$37	2018
Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement	\$709.62K	2017
Fish, crustaceans, molluscs, aquatics invertebrates	\$486.06K	2017
Products of animal origin	\$4.64K	2017
Inorganic chemicals, precious metal compound, isotope	\$34	2017
Animal, vegetable fats and oils, cleavage products	\$5.08K	2016
Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes	\$656	2016
Residues, wastes of food industry, animal fodder	\$423	2016

Gambar 2.8 Komoditas ekspor Kepulauan Solomon-Tiongkok 2016-2018 yang terus meningkat, dengan komoditas kayu tertinggi (sumber : tradingeconomics.com)

Tahun 2018, volume ekspor yang mencapai \$554,8 juta mencakup 2 per 3 total ekspor Kepulauan Solomon yang artinya, kehadiran Tiongkok untuk Kepulauan Solomon tergolong penting dan krusial dalam sisi ekonomi Kepulauan Solomon.

Untuk kegiatan import, dari Tiongkok mencapai US\$89,41 juta dengan komoditas utama alat berat seperti mesin, reaktor nuklir, dan ketel uap. Tiongkok merupakan partner import ketiga untuk Kepulauan Solomon setelah Australia (US\$110 juta) dan Singapura (US\$98 juta) (tradingeconomics.com). Volume tersebut mencapai 3,5% dari total volume ekspor Tiongkok ke seluruh dunia di tahun 2018.



Gambar 2.9 Volume perdagangan impor Kepulauan Solomon – Tiongkok yang terus meningkat (sumber : tradingeconomics.com)

Solomon Islands imports from China	Value	Year
Machinery, nuclear reactors, boilers	\$13.40M	2018
Articles of iron or steel	\$11.72M	2018
Vehicles other than railway, tramway	\$6.87M	2018
Electrical, electronic equipment	\$6.71M	2018
Iron and steel	\$6.49M	2018
Plastics	\$6.20M	2018
Cereal, flour, starch, milk preparations and products	\$3.95M	2018
Rubbers	\$3.03M	2018
Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement	\$2.72M	2018
Meat, fish and seafood preparations	\$2.57M	2018

Gambar 2.10 Komoditas import Kepulauan Solomon-Tiongkok 2016-2018 dengan komoditas mesin tertinggi (sumber : tradingeconomics.com)

Selain melalui kegiatan ekspor-impor, Tiongkok juga memperluas pengaruhnya melalui diplomasi *people to people* (P2P) melalui diaspora Tiongkok yang banyak aktif di sektor retail. Jumlah diaspora Tiongkok di Kepulauan Solomon sekitar 3000 orang dan banyak berkontribusi dalam ekonomi lokal. Hal ini juga berarti meresmikan hubungan diplomasi dengan Tiongkok atau menjaga hubungan baik antar keduanya akan semakin membuka jalur perdagangan yang lebih massif.

2.3.2 Program BRI : Pembangunan Massif dan *Green Investment*

Dikenalkan oleh Tiongkok pada tahun 2018 melalui forum APEC di Papua Nugini, 7 pemimpin Kepulauan Pasifik (PNG, Niue, Samoa, Fiji, Vanuatu, Tonga, Kepulauan Cook) menyatakan ketertarikan dan menyetujui kerjasama untuk bergabung melalui BRI. BRI (*Belt and Road Initiative*) / OBOR (*One Belt One Road*) merupakan program ‘ambisius’ Tiongkok yang bertujuan untuk menghubungkan dunia dari Asia hingga Afrika melalui pembangunan jalur darat dan laut. Disebutkan, BRI merupakan program yang

terbuka dan inklusif (Xinli 2019) sehingga memiliki 5 prioritas yang sama : koordinasi kebijakan, konektivitas infrastruktur, integrasi finansial, hubungan masyarakat, dan perdagangan tanpa hambatan. BRI juga disebut sebagai jalur sutera abad 21 yang berfokus kepada pembangunan infrastruktur dan perdagangan secara global. Yang ingin menjadi fokus penulis *soft power* Tiongkok melalui BRI untuk Kepulauan Solomon adalah kebijakan pembangunan infrastruktur massif dan investasi hijau.

Kebijakan pembangunan infrastruktur secara massif ditawarkan untuk Kepulauan Solomon, dimana permasalahan negara-negara di Kepulauan Pasifik hampir serupa : kurangnya infrastruktur dan konektivitas dengan dunia global. BRI yang memprioritaskan pembangunan industri, bandara, jalan, jembatan, gedung pemerintahan, dan sekolah dipandang menjadi kesempatan baik untuk melakukan perkembangan besar-besaran yang juga akan berpengaruh terhadap keterbukaan perdagangan, peningkatan digitalisasi, dan mengurangi ketergantungan dengan Amerika dan Australia. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Pariwisata Papua Nugini,

“Tanpa infrastruktur, kami tidak dapat melakukan apapun. Kondisi geologis kami sangat tak kenal ampun, sehingga kami membutuhkan banyak jalan, jembatan, dan bandara”- Jerry Agus

BRI menekankan Pasifik yang lebih terbuka (*less barriers*) dan modernisasi (melalui sektor ekonomi digital). Memperdalam relasi dengan Tiongkok juga diharapkan akan mengurangi ketergantungan besar terhadap Amerika dan Australia (melakukan *re-balance*) sehingga Kepulauan Solomon dan Kepulauan Pasifik lebih diperhatikan oleh komunitas internasional. Yang artinya, kebijakan BRI bermanfaat secara domestik dan internasional.

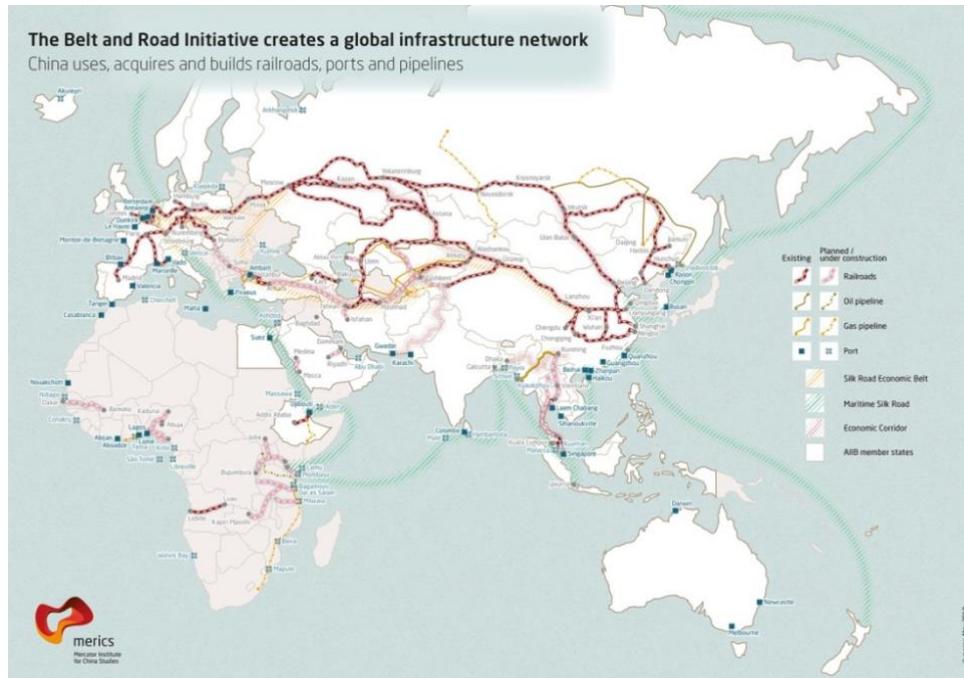
Kebijakan BRI juga sejalan dengan Kebijakan SI NIIP (*Solomon Islands National Infrastructure Investment Plan*) Kepulauan Solomon tahun 2013-2023 yang memprioritaskan investasi untuk infrastruktur ekonomi besar dalam 10 tahun. SI NIIP berfokus kepada transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara, manajemen sampah padat, energi dan power, sanitasi dan suplai air, serta telekomunikasi dan teknologi informasi. Kebijakan ini bersifat

visioner (berjangka panjang dan berkelanjutan) dan preventif (untuk mengatasi masalah perubahan iklim dan bencana alam).

Selain kebijakan pembangunan massif, kebijakan investasi hijau juga ditawarkan oleh Tiongkok untuk Kepulauan Solomon. Investasi hijau merupakan kebijakan Tiongkok yang mengedepankan ekonomi hijau, pembangunan industri dengan tenaga ramah lingkungan. Disebutkan dalam *Green Investment Principles for the Belt and Road*, investasi hijau bertujuan untuk mencapai kondisi ramah lingkungan, ketahanan iklim, dan inklusivitas sosial yang sejalan dengan Perjanjian Paris dan Agenda PBB 2020 terkait Pembangunan Berkelanjutan. Komitmen Tiongkok tersebut sejalan dengan prioritas Kepulauan Solomon terkait perubahan iklim, pemanasan global, dan perlindungan lingkungan yang banyak aktif dalam perjanjian internasional terkait lingkungan (seperti Perjanjian Paris dan Protokol Kyoto).

Kepulauan Solomon dan Kepulauan Pasifik secara geografis berada di area Samudra Pasifik dan sangat rentan terhadap perubahan iklim yang mempengaruhi kenaikan air laut dan cuaca yang tidak menentu. Perubahan iklim tersebut sangat diwaspadai oleh masyarakat dan pemerintah Kepulauan Solomon, karena akan berdampak besar terhadap masyarakatnya, kondisi laut, kondisi tanah, akses pendidikan, kesehatan, dan bahan pangan. Sehingga investasi hijau BRI mengandung misi Tiongkok : menggunakan energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi, membangun infrastruktur ramah lingkungan , dan akses ke sumber energi rendah karbon yang berdampak baik untuk ekonomi maupun lingkungan.

Gambar 2.11 jaringan infrastruktur dan ekonomi OBOR 2018 (sumber :
Mercator Institute for China Studies 2018)



2.3.3 Institusi Pendidikan

Salah satu *soft power* Tiongkok di Kepulauan Solomon sebelum meresmikan hubungan diplomatik adalah dibangunnya institusi pendidikan di Kepulauan Solomon. Sekolah Chung Wah (yang berarti *China*) sudah berdiri selama 70 tahun, oleh komunitas warga Tiongkok Daratan di Kepulauan Solomon yang bermigrasi dan membangun bisnis di Kepulauan Solomon (Jie dan Xin 2019). Sekolah Chung Wah menjadi salah satu sekolah unggul di Honiara, ibukota Kepulauan Solomon yang terkenal akan pengajaran matematikanya yang luar biasa dan lulusannya yang sukses berkarir di pemerintahan maupun bisnis lokal. Awal berdirinya, tahun 1926 hingga 1970, Sekolah Chung Wah hanya menerima murid yang berdarah / berasal dari Tiongkok Daratan. Setelah 1970, kepopuleran Sekolah Chung Wah meningkat dan mulai menerima murid lokal. Kini, Sekolah Chung Wah memiliki 300 murid dari tingkat kanak-kanak, sekolah dasar, dan tingkat menengah pertama. Dalam sekolah ini diajarkan bahasa Mandarin sebagai bagian dari tradisi

sekolah dan selama perayaan hari besar Tiongkok sekolah juga mengadakan penampilan budaya tradisional Tiongkok seperti tari naga dan pertunjukan bela diri. Di tahun 2015, pemerintah Tiongkok juga memberikan donor sebesar SBD \$310.000 untuk membantu pembangunan Sekolah Chung Wah (Saeni 2015). Sekolah Chung Wah juga disebut memiliki koneksi kuat dengan komunitas Chinese-Solomon, dan pemerintah Tiongkok sering mengirim guru ke Sekolah Chung Wah (Lloyd 2020). Hal ini menunjukkan diplomasi *people to people* untuk menanamkan *way of life* Tiongkok dan peningkatan pengaruh Tiongkok di Kepulauan Solomon yang bertumbuh secara signifikan melalui pendidikan dan bahasa.



Gambar 2.12 Donasi pemerintah Tiongkok untuk Sekolah Chung Wah (sumber : solomonstarnews.com)



Gambar 2.13 Para murid Sekolah Chung Wah mempersiapkan tarian naga (sumber : globaltimes.cn)

2.4 Kritik terhadap Kebijakan Tiongkok – Kepulauan Solomon

Sub bab ini bertujuan untuk memaparkan berbagai kritik yang ditujukan kepada kebijakan Tiongkok dari berbagai pihak diluar Tiongkok dan Kepulauan Solomon, seperti negara lain (pihak Barat), penelitian, dan media massa. Dengan mengetahui kritikan yang ada, tulisan ini hendak menganalisa seberapa jauh kritikan tersebut mempengaruhi keputusan dan perspektif Kepulauan Solomon terhadap dua negara.

2.4.1 *Debt-Trap* Tiongkok

Sering ditafsirkan sebagai Diplomasi Hutang / Jebakan Hutang, merupakan kerangka diplomasi ekonomi Tiongkok berbentuk pemberian pinjaman dari negara pemberi pinjaman (*lender*) kepada negara penerima pinjaman (*borrower*), yang dalam kondisi disengaja ataupun tidak, berujung menjerumuskan negara peminjam (*borrower*) untuk terperangkap dalam hutangnya sendiri (Setyanti, 2018). Seringnya negara peminjam akan mengambil alih aset strategis untuk mengganti hutang negara peminjam (Hameiri, 2020). Salah satu kasus terkenalnya adalah pelabuhan di Hambantota, Sri Lanka yang disewakan kepada Tiongkok selama 99 tahun sejak Desember 2017. Oleh oposisi Tiongkok, Diplomasi Hutang tersebut terus digaungkan untuk menggambarkan ‘kejahatan’ dan ‘kelicikan’ kebijakan ekonomi Tiongkok. Diplomasi Hutang tersebut kian tersorot oleh dunia internasional dan sedikit banyak menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpercayaan terhadap diplomasi ekonomi Tiongkok.

Isu Diplomasi Hutang kembali diangkat oleh pihak Taiwan kepada Kepulauan Solomon yang memilih Beijing-menerima BRI Tiongkok dibandingkan mempertahankan Taiwan. BRI Tiongkok berfokus kepada pembangunan dan infrastruktur, yang artinya tidak jauh dari pemberian hutang / pinjaman besar untuk pembangunan dan industri sehingga isu Diplomasi Hutang kembali muncul. Juru bicara Kemenlu Taiwan, Joanne Ou (Lee, 2020) menyampaikan bahwa “ekspansi Tiongkok di Pasifik telah membuat bayak negara terjermus ke dalam Diplomasi Hutang Tiongkok”. Lebih lanjut, “janji

Tiongkok atas pembangunan infrastuktur nyatanya menimbulkan kerusakan serius terhadap ekosistem lokal dan melanggar kedaulatan mereka.”

2.4.2. Pelanggaran HAM

Mengingat Kepulauan Solomon erat dengan demokrasi dan kebebasan hak asasi manusia (terutama kebebasan beragama) isu Tiongkok yang kerap melakukan pelanggaran HAM turut menjadi kekhawatiran selain isu Diplomasi Hutang. Setidaknya 2 isu utama memperkuat argumen bahwa Tiongkok melakukan pelanggaran HAM : penegakan hukum nasional baru di Hong Kong dan pembatasan kaum minoritas muslim Uyghur di Xinjiang. Oleh media Barat / oposisi Tiongkok, Tiongkok terus digambarkan sebagai “penjahat kemanusiaan” yang terus memperparah dan melanggengkan pelanggaran HAM itu sendiri. Hingga tulisan ini dibuat, isu terkait muslim Uyghur masih memanas dan Tiongkok terus dipojokkan oleh puluhan negara di dunia (Lederer, 2020). Isu tersebut dikhawatirkan akan kembali muncul di Pasifik, atau Tiongkok melakukan represi dan pelanggaran HAM terhadap agama lokal dan nilai demokrasi Kepulauan Solomon. Malaita, provinsi terbesar di Kepulauan Solomon dengan penduduk sebanyak 200.000 jiwa menjadi salah satu wilayah yang pro-Taiwan dan mengecam ‘permusuhan’ Tiongkok terhadap orang Kristen dan sistem politik Tiongkok yang cenderung otoriter (Cavanaugh 2020).

2.4.3. Korupsi antar pembisnis dan pemerintah

Sebelum kebijakan BRI ditawarkan kepada Kepulauan Solomon oleh Xi Jinping, beberapa perusahaan Tiongkok dan jajarannya yang telah lama masuk ke Kepulauan Solomon terkenal bertahun-tahun melakukan aksi suap dan korupsi kepada elit dan anggota kabinet pemerintahan Kepulauan Solomon. Salah satunya adalah Sam Enterprise Group, perusahaan milik negara (BUMN Tiongkok) yang bergerak di bidang industri petrokimia yang sering memberi hadiah wisata mewah ke Tiongkok atau Singapura, dan membantu biaya kampanye Sogavare dan jajarannya (Cave 2019, Yaung, Yani, Dermawan 2020).

